



Judul : Rahasia Negara
Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 15

Tajuk

Rahasia Negara

Djumyati Partawidjaja

Berbicara mengenai data di Indonesia, sepertinya tidak akan pernah selesai. Undang-Undang Keterbukaan Informasi sudah terbit sejak tahun 2008, tapi masih ada banyak kementerian/lembaga yang enggan mengeluarkan data-datanya dengan lengkap.

Terakhir ramai dipermasalahkan data sebagai rahasia negara ada di debat capres ke-3 Minggu 8 Januari. Terlihat selisih paham Prabowo, salah satu capres yang juga Menteri Pertahanan, dengan 2 capres lain mengenai data pertahanan.

Anies dan Ganjar mempertanyakan data anggaran pertahanan yang dijawab Prabowo sebagai rahasia negara. Prabowo sendiri menyatakan semuanya sebenarnya terbuka, tapi dalam forum debat kemarin tidak akan ada cukup waktu untuk menerangkan masalah pertahanan yang kompleks. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga selalu berkonsultasi dengan Komisi I DPR RI untuk membahas anggarannya.

Sebenarnya lucu kalau jawaban dalam sebuah perdebatan adalah pertemuan (tertutup) lainnya. Rupanya masih belum ada kesepakatan mengenai keterbukaan data. Bagian mana yang masuk dalam rahasia sebuah negara dan mana saja data-data yang harus dibuka.

Tentu saja memang ada banyak hal yang tidak bisa diungkapkan kepada umum karena menyangkut strategi pertahanan negara. Tetapi tidak juga semua data yang ada di sana harus menjadi rahasia. Semakin besarnya anggaran negara untuk belanja di Kementerian Pertahanan menjadi salah satu alasan yang bagus untuk membuat Kementerian ini bisa lebih terbuka.

Di satu sisi, kita memang membutuhkan dana yang besar untuk membangun pertahanan yang kuat untuk negeri kita ini. Ketiga capres dalam debat kemarin sepertinya sepakat untuk mendorong belanja yang lebih besar untuk membangun pertahanan di Indonesia. Tapi anggaran belanja pertahanan yang ditargetkan bisa mencapai 1%-2% PDB adalah jumlah dana yang besar. Di mana ada dana besar yang bisa menggelontor tanpa audit dan kontrol memadai, tentu akan menjadi surga untuk para pemburu rente.

Dengan APBN yang ada sekarang ini, untuk anggaran ini pemerintah juga harus berutang kepada luar negeri atau menerbitkan surat utang. Dampak panjang ini tentu harus ditelisik dengan cermat.

Pada titik tertentu keterbukaan informasi ini harus dilihat bukan upaya untuk "menelanjangi" apa pun tapi untuk menjaga setiap sen uang negara ini bisa dibelanjakan dengan cermat. ■